EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.5, No.6, September 2026

# Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan PNBP Atas Penerbitan Sertifikat Kesehatan Di BPPMHKP Manado

**Aditya Arimau[1], Johanes Herbert Tene[2], Rolina Emmy Manggopa[3]**
[1,2,3] Politeknik Negeri Manado, Indonesia
E-mail: gkun309@gmail.com[1] , jemy.tene@polimdo.ac.id[2] , emmyrolina2020@gmail.com[3]

**Article History:**
Received: 07 Juli 2026
Revised: 24 Agustus 2026
Accepted: 15 September 2026

**Keywords:** *Sistem Pengendalian Internal,PNBP, Sertifikat Kesehatan.*

***Abstract:*** *PNBP Sebagai komponen strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional, menuntut akuntabilitas dan transparansi yang tinggi agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terjaga* (Ditisrama et al., 2022). *Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan PNBP yang bersumber dari penerbitan Sertifikat Kesehatan di BPPMHKP Manado, mengkaji efektivitasnya berdasarkan prinsip pengendalian internal dan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal penerimaan PNBP atas penerbitan Sertifikat Kesehatan di BPPMHKP Manado telah diterapkan dengan standar SOP yang baik,. Namun, efektivitas implementasinya belum optimal karena masih terdapat kelemahan pada beberapa komponen SPIP, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan belum optimalnya pemisahan fungsi tugas, penilaian risiko yang belum terstruktur, belum adanya review independen dan rekonsiliasi rutin, serta pemantauan internal yang masih terbatas. Selain itu, gangguan teknis pada aplikasi SIAPMUTU KKP dan belum tersedianya prosedur contingency plan yang terstandarisasi menjadi kendala dalam mendukung efektivitas pengendalian internal penerimaan PNBP.*

## PENDAHULUAN

Kontribusi PNBP dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional memposisikannya sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan (Ditisrama et al., 2022). Di sektor kelautan dan perikanan, BPPMHKP berperan aktif melalui penerbitan Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang berfungsi menjamin standar mutu dan keamanan pangan komoditas perikanan sekaligus menjadi prasyarat distribusi dan ekspor (Menteri KKP RI, 2016). Efektivitas pengelolaan penerimaan PNBP sangat bergantung pada keberadaan sistem pengendalian internal yang memadai guna menjamin efisiensi operasional, kredibilitas pelaporan keuangan, dan kepatuhan regulasi (Karo & Datu, 2018). Dalam konteks ini, aplikasi SIAPMUTU KKP diimplementasikan sebagai instrumen pendukung proses pelayanan dan pencatatan PNBP secara

terintegrasi.

Di BPPMHKP Manado, sistem pengendalian internal belum berfungsi secara optimal, terutama akibat gangguan teknis pada aplikasi SIAPMUTU KKP yang berdampak pada penundaan penerbitan sertifikat serta keterbatasan jumlah pegawai yang menghambat penerapan pemisahan fungsi tugas. Mengingat tantangan digitalisasi layanan publik dan keterbatasan sumber daya manusia, evaluasi sistematis terhadap efektivitas sistem pengendalian internal menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mengacu pada model COSO digunakan sebagai landasan analisis guna mengenali kelemahan sistem, mengevaluasi risiko pengendalian, dan merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan akurasi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan PNBP.

## LANDASAN TEORI

COSO mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai suatu proses yang melibatkan dewan direksi, manajemen, dan seluruh personel dalam memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, mencakup dimensi operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Kerangka ini tersusun atas lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Sriyanto et al., 2023). Dalam ranah pemerintahan, kelima komponen tersebut diadopsi melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang bertujuan memberikan jaminan memadai atas efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap regulasi (Whitney G.G., 2008).

Pemisahan fungsi tugas (segregation of duties) merujuk pada pendekatan pengorganisasian kerja di mana tanggung jawab dalam suatu proses bisnis didistribusikan kepada lebih dari satu individu (Widari & Sutrisno, 2017). Implementasi prinsip ini dimaksudkan untuk menekan risiko kecurangan, meningkatkan ketepatan data, dan membangun mekanisme *check and balance* dalam organisasi. Selain aspek pengendalian manual, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) juga memegang peranan krusial dalam mengumpulkan, mencatat, serta mengelola data transaksi keuangan menjadi informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan (Zahrah et al., 2025). Praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan publik menuntut penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas secara konsisten (Alviano & Ayudiyati, 2024).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif karena menyajikan gambaran fenomena secara komprehensif dan kontekstual berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Peneliti berperan sebagai instrumen pengumpulan data utama (Sasikome et al., 2025). Prosedur penelitian meliputi identifikasi permasalahan, kajian teori berbasis kerangka COSO sebagai fondasi analisis, pengumpulan data, analisis sistem pengendalian internal penerimaan PNBP pada penerbitan Sertifikat Kesehatan menggunakan lima komponen COSO yang dikaitkan dengan unsur SPIP, serta evaluasi efektivitas sistem. Kajian dilakukan di kantor BPPMHKP Manado yang beralamat di Jalan Adipura Raya, Paniki Bawah, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Analisis difokuskan pada evaluasi lima komponen SPIP, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Data dikumpulkan dari sumber primer melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi di lapangan, serta sumber sekunder berupa SOP penerbitan Health Certificate, bukti setoran kas negara, data mentah sertifikat, dan referensi literatur ilmiah relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tata Cara Pengajuan Sertifikat Kesehatan

Berdasarkan penelitian, tata cara pengajuan Sertifikat Kesehatan di BPPMHKP Manado dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: pertama, pengguna jasa mengajukan permohonan ke aplikasi SIAPMUTU KKP dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan melampirkan dokumen persyaratan, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium; kedua, petugas menerima berkas permohonan dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen; ketiga, setelah berkas dinyatakan lengkap, petugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap komoditas perikanan; dan keempat, jika hasil pemeriksaan memenuhi syarat, dilakukan penerbitan Sertifikat Kesehatan. Untuk setiap penerbitan Sertifikat Kesehatan, pengguna jasa wajib membayar biaya sesuai dengan tarif PNBP yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pembayaran dilakukan melalui website remsi Harmoni PNBP setelah dibuat kode billing oleh petugas atau verifikator UPT melalui mekanisme Non-Tunai (NTB) ke rekening kas negara yang telah ditetapkan setelah dibuatkannya surat perintah pembayaran sesuai dengan kategori atau aturan yang berlaku di aplikasi SIAPMUTUKKP, dan bukti pembayaran menjadi salah satu syarat dalam proses penerbitan sertifikat.

### Peran Aplikasi SIAPMUTU KKP

Aplikasi SIAPMUTU KKP (Sistem Informasi dan Administrasi Pengendalian Mutu) merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung proses pelayanan pengendalian mutu hasil perikanan, termasuk penerbitan Sertifikat Kesehatan. Aplikasi ini memiliki fungsi utama untuk mendata, mencatat, dan memproses permohonan sertifikat secara terintegrasi.

Berdasarkan temuan di lapangan, aplikasi SIAPMUTU KKP dimanfaatkan oleh petugas BPPMHKP Manado untuk melakukan pencatatan data permohonan pengguna jasa, mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan verifikasi, menerbitkan Sertifikat Kesehatan secara digital, serta melaporkan data penerimaan PNBP ke portal Harmoni PNBP. Meskipun demikian, observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pengoperasian aplikasi ini masih menghadapi sejumlah kendala teknis yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

### Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan PNBP

Evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada kerangka lima elemen SPIP. Hasil analisis yang diperoleh dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi di BPPMHKP Manado disajikan dalam uraian berikut.

### Lingkungan Pengendalian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian di BPPMHKP Manado telah mengindikasikan adanya beberapa aspek positif, telah disusun SOP penerbitan Sertifikat Kesehatan yang berfungsi sebagai pedoman operasional, dan personil yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat telah memiliki pemahaman dasar mengenai prosedur yang berlaku.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah kelemahan yang perlu mendapat perhatian. Keterbatasan jumlah personil menjadi penghambat utama dalam implementasi prinsip pemisahan fungsi tugas (segregation of duties). Secara ideal, fungsi penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan penerbitan sertifikat dilaksanakan oleh individu yang berbeda guna meminimalisir risiko kesalahan dan kecurangan. Akan tetapi, kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa satu pegawai sering kali menjalankan beberapa fungsi sekaligus akibat keterbatasan sumber daya

manusia.

**Penilaian Resiko**

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa BPPMHKP Manado belum menyusun dokumen penilaian risiko secara formal khusus untuk pengelolaan penerimaan PNBP. Praktik identifikasi risiko yang ada bersifat reaktif dan belum tersistematis, lebih menanggapi permasalahan yang sudah terjadi dibanding mencegahnya. Kendala teknis pada aplikasi SIAPMUTU KKP termasuk dalam risiko operasional yang telah dikenali, namun belum terdapat rencana mitigasi tertulis untuk mengatasinya.

Beberapa risiko utama yang perlu menjadi perhatian meliputi potensi ketidakakuratan data penerimaan PNBP yang disebabkan oleh gangguan sistem aplikasi, serta risiko tidak tercapainya target penerimaan negara akibat hambatan dalam proses pelayanan. Lebih lanjut, penerapan pemisahan fungsi tugas yang belum memadai juga berpotensi melemahkan efektivitas pengendalian internal.

**Kegiatan Pengendalian**

Aktivitas pengendalian yang merupakan bagian penting untuk memastikan Kebijakan atau prosedur yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan dengan konsisten untuk mencapai tujuan entitas. Hasil temuan menunjukkan bahwa beberapa kegiatan pengendalian telah diimplementasikan di BPPMHKP Manado. Instansi ini telah memiliki SOP yang mengatur alur penerbitan Sertifikat Kesehatan dari tahap permohonan hingga penerbitan, mekanisme verifikasi kelengkapan dokumen, pemanfaatan aplikasi SIAPMUTU KKP sebagai media pencatatan dan pelaporan, serta sistem koordinasi dengan unit vertikal di tingkat pusat terkait pelaporan penerimaan PNBP.

Kendala yang ditemukan antara lain belum konsistennya penerapan pemisahan fungsi tugas antara personil yang melaksanakan penerbitan sertifikat. Keterbatasan jumlah pegawai mengakibatkan satu personil harus menjalankan beberapa fungsi secara bersamaan. Selain itu, mekanisme review independen terhadap data penerimaan yang tercatat dalam SIAPMUTU KKP belum tersedia, dan kegiatan rekonsiliasi data penerimaan PNBP juga belum dilaksanakan secara berkala untuk memverifikasi kesesuaian antara data aplikasi dengan setoran ke rekening negara.

**Informasi dan Komunikasi**

Aplikasi SIAPMUTU KKP digunakan sebagai sistem informasi utama dalam pengelolaan penerimaan PNBP di BPPMHKP Manado. Meskipun memiliki peran strategis, penggunaannya menghadapi sejumlah kendala teknis yang signifikan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi meliputi frekuensi gangguan teknis dan error sistem yang berdampak pada penundaan penerbitan sertifikat, belum tersedianya prosedur backup manual yang terstandarisasi ketika sistem mengalami gangguan, serta minimnya sosialisasi dan pelatihan bagi petugas dalam menangani masalah teknis aplikasi.

Dalam aspek komunikasi, pelaporan kendala dari petugas teknis lapangan kepada pimpinan internal telah berjalan dengan baik. Kendala yang lebih signifikan terdapat pada mekanisme pelaporan masalah aplikasi ke unit pengembang SIAPMUTU KKP di tingkat pusat yang belum memiliki alur komunikasi yang jelas dan respons yang cepat. Kondisi ini mengakibatkan gangguan sistem sering berlangsung relatif lama sebelum mendapatkan solusi perbaikan.

**Pemantauan**

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemantauan sistem pengendalian internal di BPPMHKP Manado dilakukan melalui beberapa jalur. Kepala Kantor melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas pegawai. Di tingkat yang lebih tinggi, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan pengawasan internal secara periodik. Selain itu, terdapat pemantauan eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Meskipun mekanisme pemantauan telah tersedia, pengawasan internal yang bersifat preventif dan detektif belum dilaksanakan secara intensif. Belum adanya unit atau personil yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan evaluasi rutin terhadap kelengkapan dan keakuratan data penerimaan PNBP. Selain itu, pelaporan kendala sistem aplikasi belum ditindaklanjuti dengan analisis dampak yang komprehensif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal.

**Kendala Dalam Implementasi Sistem Pengendalian Internal**

Hasil penelitian mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi BPPMHKP Manado dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal atas penerimaan PNBP melalui penerbitan Sertifikat Kesehatan. Kendala-kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Kendala pertama bersumber pada permasalahan teknis aplikasi SIAPMUTU KKP yang menjadi hambatan utama dalam proses pelayanan dan pencatatan PNBP. Frekuensi gangguan sistem yang cukup tinggi menyebabkan penundaan dalam penerbitan sertifikat, yang berdampak pada keterlambatan penerimaan negara serta berpotensi menurunkan tingkat kepuasan pengguna jasa. Ketidakstabilan sistem aplikasi juga meningkatkan kerentanan terhadap risiko kehilangan data atau ketidakakuratan informasi yang tersimpan.

Kendala kedua terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah personil yang terbatas menghambat penerapan prinsip pemisahan fungsi tugas (*segregation of duties*) yang menjadi salah satu pilar pengendalian internal. Dalam kondisi aktual, satu pegawai harus menjalankan berbagai fungsi secara bersamaan, mencakup penerimaan berkas, verifikasi, penginputan data, hingga penerbitan sertifikat. Kondisi tersebut secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan yang tidak terdeteksi.

Kendala ketiga adalah belum tersedianya prosedur contingency plan yang terstandarisasi. Ketika aplikasi SIAPMUTU KKP mengalami gangguan teknis, tidak ada panduan operasional baku mengenai mekanisme layanan alternatif dan pencatatan manual yang dapat diterapkan untuk menjaga kontinuitas pelayanan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip pengendalian internal.

**Pembahasan**

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal atas penerimaan PNBP melalui penerbitan Sertifikat Kesehatan di BPPMHKP Manado telah diimplementasikan, namun tingkat efektivitasnya masih belum maksimal. Hasil ini konsisten dengan argumentasi Karo dan Datu (2018) yang menegaskan bahwa keberhasilan sistem pengendalian internal sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta infrastruktur sistem informasi yang andal.

Gangguan teknis pada aplikasi SIAPMUTU KKP yang menjadi kendala utama terbukti secara signifikan mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Sebagaimana dikemukakan (Achmad et al., 2026), pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat pengawasan, dengan catatan keberhasilannya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan pemeliharaan sistem yang

berkelanjutan. Ketidakstabilan aplikasi SIAPMUTU KKP membawa risiko terhadap kredibilitas pelaporan keuangan, yang sejatinya menjadi salah satu tujuan utama penerapan sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Keterbatasan personil serta belum optimalnya penerapan pemisahan fungsi tugas menjadi temuan lain yang krusial. Karo dan Datu (2018) menegaskan bahwa *segregation of duties* merupakan kompensasi pengendalian yang mendasar untuk mencegah kesalahan dan penyimpangan. Praktik yang terjadi di BPPMHKP Manado, dimana satu pegawai menangani beberapa fungsi secara bersamaan, bertentangan dengan prinsip pemisahan fungsi tugas dan berpotensi meningkatkan risiko material terhadap akurasi data penerimaan PNBP.

Selain permasalahan di atas, belum tersedianya penilaian risiko yang terstruktur dan contingency plan yang terstandarisasi mengindikasikan bahwa elemen penilaian risiko dalam kerangka SPIP belum diimplementasikan secara menyeluruh. Sebagaimana diungkapkan Ditisrama et al. (2022), organisasi sektor publik yang idealnya harus memiliki pemahaman komprehensif terhadap risiko operasionalnya disertai rencana mitigasi yang terukur.

Berdasarkan keseluruhan temuan yang telah diuraikan, peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal memerlukan langkah-langkah strategis, meliputi perbaikan dan pemeliharaan rutin aplikasi SIAPMUTU KKP, penambahan atau redistribusi personil untuk mengaktifkan kembali prinsip pemisahan fungsi tugas, penyusunan prosedur contingency plan yang terdokumentasi, serta penguatan mekanisme pemantauan internal yang bersifat preventif dan detektif.

## KESIMPULAN

Beberapa Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Pertama, implementasi sistem pengendalian internal atas penerimaan PNBP melalui penerbitan Sertifikat Kesehatan di BPPMHKP Manado telah dilakukan, meskipun tingkat efektivitasnya masih belum maksimal. Indikasi positif terlihat dari keberadaan SOP penerbitan sertifikat, mekanisme verifikasi dokumen, pemanfaatan aplikasi SIAPMUTU KKP, dan sistem koordinasi dengan unit vertikal terkait pelaporan PNBP. Meskipun demikian, penerapan kelima komponen SPIP secara komprehensif masih menghadapi berbagai kendala.

Kedua, dalam aspek lingkungan pengendalian, keterbatasan jumlah personil menjadi penghambat utama terhadap penerapan prinsip pemisahan fungsi tugas (*segregation of duties*). Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa satu pegawai sering kali menjalankan beberapa fungsi secara bersamaan, mencakup penerimaan berkas, verifikasi, penginputan data, hingga penerbitan sertifikat, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kesalahan yang tidak terverifikasi.

Ketiga, praktik penilaian risiko yang berjalan bersifat reaktif dan belum tersistematis, serta belum terdapat dokumen penilaian risiko yang tersusun secara formal. Rencana mitigasi tertulis untuk mengatasi permasalahan teknis pada aplikasi SIAPMUTU KKP sebagai risiko operasional utama juga belum tersedia.

Keempat, kegiatan pengendalian telah dijalankan melalui SOP, verifikasi kelengkapan dokumen, dan pemanfaatan aplikasi SIAPMUTU KKP, namun penerapan pemisahan fungsi tugas belum konsisten. Mekanisme review independen serta rekonsiliasi data PNBP secara berkala juga belum dilaksanakan.

Kelima, sistem informasi yang diwakili oleh aplikasi SIAPMUTU KKP kerap mengalami gangguan teknis, belum dilengkapi dengan sistem backup manual yang terstandarisasi, dan petugas belum memperoleh pelatihan yang memadai. Mekanisme pelaporan permasalahan aplikasi ke unit pengembang di tingkat pusat juga belum memiliki alur yang baku.

Keenam, pengawasan internal bersifat preventif dan detektif belum dilaksanakan secara intensif, dan belum tersedianya prosedur contingency plan yang terstandarisasi menjadi kendala komplementer dalam upaya mengoptimalkan sistem pengendalian internal.

Peneliti menyampaikan sejumlah saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Kepada BPPMHKP Manado, disarankan untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin aplikasi SIAPMUTU KKP disertai penyusunan prosedur contingency plan tertulis sebagai alternatif layanan saat sistem mengalami gangguan. Selain itu, perlu dilakukan pengajuan penambahan personil atau redistribusi beban tugas guna mengaktifkan kembali prinsip pemisahan fungsi tugas sesuai standar pengendalian internal. Penyusunan dokumen penilaian risiko formal yang dilengkapi mitigasi terukur untuk setiap risiko operasional, penerapan mekanisme review independen dan rekonsiliasi data penerimaan PNBP secara berkala, serta penguatan pemantauan internal preventif-detektif melalui pembentukan unit khusus atau penunjukan personil dedikasi juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.

Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, direkomendasikan untuk mengevaluasi dan melakukan pengembangan ulang aplikasi SIAPMUTU KKP guna meningkatkan stabilitas dan kehandalannya dalam mendukung proses pelayanan serta pelaporan PNBP di seluruh unit pelaksana teknis. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, termasuk perangkat keras dan konektivitas internet yang stabil, menjadi prasyarat penting. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi periodik bagi petugas terkait pengoperasian aplikasi serta penanganan kendala teknis, serta penyusunan pedoman teknis mengenai mekanisme pelaporan masalah aplikasi ke unit pengembang dengan alur dan respons yang jelas, perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan studi lanjutan dengan pendekatan kuantitatif guna mengukur tingkat efektivitas sistem pengendalian internal secara lebih objektif dan terukur. Studi komparatif yang melibatkan beberapa unit pelaksana teknis BPPMHKP di berbagai lokasi juga direkomendasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi sistem pengendalian internal dalam pengelolaan PNBP di sektor kelautan dan perikanan.

## DAFTAR REFERENSI

Achmad, R., Perkasa, P., Pitono, A., & Sartika, I. (2026). *JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2020-2024*. *12*(1), 47–60.

Alviano, I., & Ayudiyati, C. (2024). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi Melalui Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(1).

Ditisrama, T. D., Sinaulan, R. L., & Ismail, I. I. (2022). Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia. *Syntax Idea*, *4*(6). https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i6.1897

Karo, L. N. D., & Datu, C. (2018). IPTEKS PENGENDALIAN INTERN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) POLDA SULUT. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, *2*(02). https://doi.org/10.32400/jiam.2.02.2018.21801

M.Muhaling., J.D.L.Warongan., M. Y. B. K. (2023). *PERSETUJUAN BERLAYAR ( SPB ) PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN ( KSOP ) MANADO THE GOVERNMENT ’ S INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR THE SERVICE OF PERMITS*

*FOR SAILING PERMITS ( SPB ) AT THE MANADO PORT AUTHORITY AND PORT AUTHORITY ( KSOP ) Jurna*. *11*(3), 848–859.

Menteri KKP RI. (2016). 10/Permen-Kp/2016_Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. *Permen KP*, (15018), 1–23.

Sasikome, T., III Akuntansi, D., Negeri Manado Jl Raya Politeknik, P., Mapanget, K., Manado, K., Utara Adelia Priskayani Jura, S., Utara Filiysia Rembet, S., Utara Gabriella Syalomitha Darotong, S., Utara Andreuw Kristian Pantow, S., Utara Merry Ligia Sael, S., Utara, S., Artikel, R., & Kunci, K. (2025). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pengelolaan Persediaan Barang Dagang Pada Polimart Politeknik Negeri Manado. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, *11*(2).

Sriyanto, D., Harsono, S., & Chairina, C. (2023). Sistem Pengendalian Internal Atas Dana Desa: Analisis COSO Framework 2013. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, *10*(2), 17–31. https://doi.org/10.30743/akutansi.v10i2.8565

Whitney G.G., F. D. R. (2008). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008. *管理现代化*, *76*(3), 61–64.

Widari, L., & Sutrisno. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, *5*(10).

Zahrah, F., Putri S, N. A., Maulana, A., & Apriansyah, R. (2025). PERAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGENDALIAN SIKLUS PERSEDIAAN DAN PERGUDANGAN BERDASARKAN KERANGKA COSO. *JURNAL LENTERA AKUNTANSI*, *10*(2). https://doi.org/10.34127/jrakt.v10i2.1916